

Sosialisasi Konsep *Blue Economy* dalam Pembangunan Kawasan Wisata Pesisir Kota Makassar

Juswan, Taufiqur Rachman^{1*}, Daeng Paroka, Muhammad Zubair Muis Alie, Bulan Purnama, Ardi

Departemen Teknik Kelautan, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin¹
trachman@unhas.ac.id^{1*}

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu dari 193 negara yang berkomitmen terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam paradigma baru pembangunan Indonesia berkelanjutan ini, sektor kemaritiman menjadi prioritas pembangunan di masa depan dengan konsep *blue economy*, yakni ekonomi laut berkelanjutan yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial dengan jaminan kepastian kelestarian lingkungan dalam jangka panjang. Fokus *blue economy* dengan strategi ekonomi maritim ini menjadikan masyarakat pesisir sebagai pusat pertumbuhan *blue economy*. Kota Makassar memiliki kawasan wisata pesisir yang terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate Makassar, dan dikelola berbasis masyarakat oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tanjung Merdeka. Untuk menjaga proses keberlanjutan pengelolaan kawasan wisata pesisir ini dibutuhkan pemahaman konsep *blue economy* sesuai strategi pembangunan maritim. Sosialisasi konsep *blue economy* dalam pembangunan kawasan wisata pesisir Kota Makassar telah dilangsungkan dan dicapai peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta dengan nilai rata-rata peserta sebelum dan sesudah sosialisasi secara berturut-turut sebesar 36 dan 86. Pemahaman konsep pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berkelanjutan, serta cara berpartisipasi dalam menghadapi tantangan penurunan kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim ini, akan melengkapi peran LPM Tanjung Merdeka sebagai pengelola wisata dengan konsep *blue economy*. Penilaian penerapan konsep *blue economy* di kawasan wisata pesisir telah dilakukan dan memenuhi konsep *blue economy* sesuai teori Pauli (2010).

Kata Kunci: Berkelanjutan; *Blue Economy*; Kota Makassar; Pesisir; Wisata.

Abstract

Indonesia is one of 193 countries committed to the sustainable development goals (SDGs). In this new paradigm of sustainable Indonesian development, the maritime sector is a priority for future development with the concept of *blue economy*, which is a sustainable ocean economy that produces economic and social benefits with the assurance of long-term environmental sustainability. The focus of the *blue economy* with this maritime economic strategy makes coastal communities the centre of *blue economy* growth. Makassar City has a coastal tourism area located in Tanjung Merdeka Village, Tamalate District Makassar, and is managed community-based by Non-Governmental Organizations (NGO) of Tanjung Merdeka. To maintain the sustainability process of coastal tourism area management, it is necessary to understand the concept of *blue economy* according to the maritime development strategy. The socialization of the concept of *blue economy* in the development of coastal tourism areas in Makassar City has been carried out and an increase in the knowledge and understanding of participants was achieved with an average score of 36 and 86, respectively. Understanding the concept of sustainable coastal and marine resource management, as well as how to participate in facing the challenges of environmental degradation and climate change, will complement the role of Tanjung Merdeka NGO as a tourism manager with the concept of *blue economy*. Assessment of the application of the concept of *blue economy* in coastal tourism areas has been carried out and fulfils the concept of *blue economy* according to Pauli's theory (2010).

Keywords: Sustainable; *Blue Economy*; Makassar City; Coastal; Tourism.

1. Pendahuluan

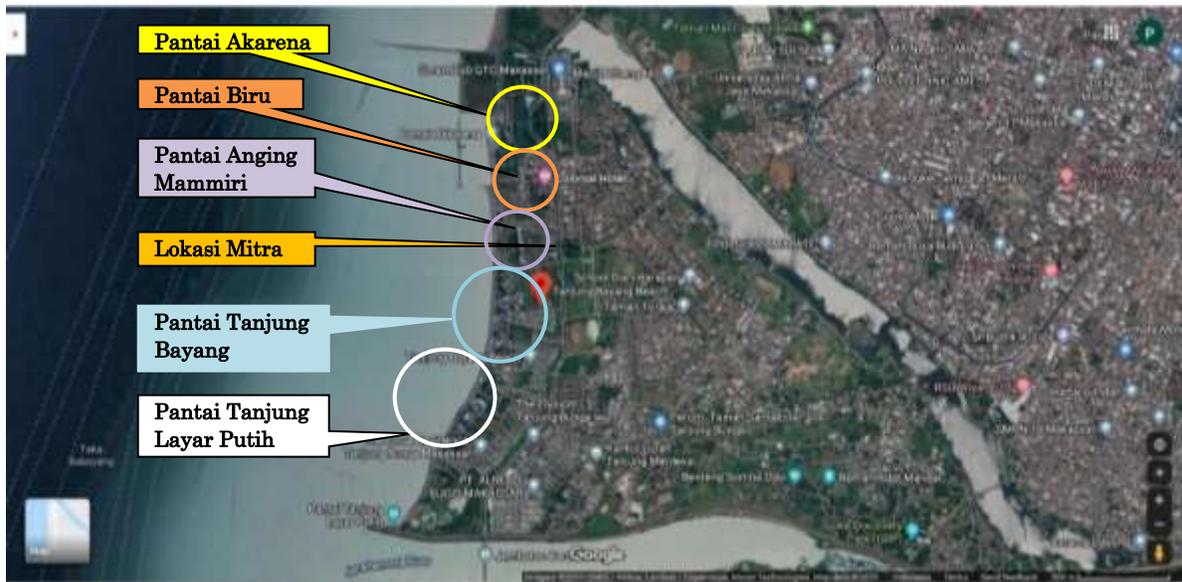
Indonesia termasuk dari 193 negara yg berkomitmen terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Olehnya itu, pembangunan berkelanjutan menjadi landasan perwujudan visi Indonesia 2045. Dalam paradigma baru pembangunan Indonesia berkelanjutan ini, sektor kemaritiman

menjadi prioritas pembangunan di masa depan dengan konsep *blue economy* (ekonomi biru). Dalam kerangka pembangunan kemaritiman Indonesia, konsep *blue economy* dilakukan dengan strategi yang meliputi 3 aspek yakni ekonomi maritim, kekuatan maritim, dan peradaban maritim (Kementerian PPN/Bappenas, 2022). Salah satu poin strategi pembangunan ekonomi maritim adalah pariwisata bahari yang inklusif dengan ditopang peradaban maritim yakni menciptakan sumber daya manusia (SDM) maritim yang unggul, inovasi teknologi kemaritiman dan budaya maritim yang kuat sebagai basis peradaban bahari.

Blue economy adalah ekonomi laut berkelanjutan yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial sambil memastikan kelestarian lingkungan sumber manfaat tersebut dalam jangka panjang (World Bank & UN DESA, 2017). Konsep *blue economy* mengacu pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan mata pencaharian. Fokus *blue economy* ini adalah menjadikan masyarakat lokal pesisir sebagai pusat pertumbuhan *blue economy* dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir oleh Pemerintah. *Blue economy* dapat mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang hidup berdampingan dengan sumber daya pesisir dan laut (Nasution, 2022). Peningkatan kapasitas masyarakat pesisir dapat diwujudkan dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara terpadu dengan memahami prinsip berkelanjutan dan mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut, ikut berpartisipasi menghadapi tantangan penurunan kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim, dan melawan kasus pelanggaran kelautan dan perikanan (Kementerian PPN/Bappenas, 2022).

Kota Makassar dikenal sebagai kawasan wisata pesisir oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara seperti Pulau Khayangan dan Pulau Gusung yang berada tidak jauh dari pusat Kota Makassar. Salah satu wisata pesisir yang berada sekitar 4 km dari pusat Kota Makassar yakni wisata pesisir di Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate, pada Gambar 1. Wisata pesisir ini dikelola oleh kelompok berbasis masyarakat yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tanjung Merdeka, meliputi kawasan wisata Pantai Biru, Pantai Anging Mammiri, Pantai Tanjung Bayang dan Pantai Tanjung Layar Putih. Di lokasi wisata pesisir ini, keindahan sunset dari arah ufuk barat Selat Makassar dapat dinikmati oleh wisatawan dari dalam maupun luar kota serta mancanegara. Aktivitas wisata pantai banyak dilakukan wisatawan dengan menjadikan pantai sebagai area bermain, olah raga di laut (berenang, *diving*, *banana boat*, dan *snorkling*), memancing, dan bersantai menikmati keindahan pemandangan serta mengamati biota laut (ubur-ubur, kepiting, bunga karang atau spons serta kerang laut), seperti ditunjukkan pada Gambar 2.

Pembangunan kemaritiman Indonesia berbasis ekonomi biru khususnya kawasan wisata pesisir Kota Makassar ini cukup memiliki tantangan yang tidak ringan, antara lain fenomena *geohazard* dan hidrometeorologi yang berdampak potensi bencana (Rachman dkk, 2023a; Rachman dkk, 2023b; Rachman dkk, 2023c), keamanan moda transportasi pelayaran dan sarana pelabuhan (Rachman dkk, 2019; Rachman dkk, 2018), kondisi geomorfologi wilayah pesisir Kota Makassar sangat rawan terhadap resiko bencana (Suleman dkk, 2018), kerentanan terhadap perubahan iklim dan tingkat kenaikan tinggi muka air laut (Umar dkk, 2019), dan problematika perubahan pemanfaatan lahan (Rachman dkk, 2022; Rachman dan Arifki, 2022), serta implementasi sempadan pantai di kawasan Pantai Tanjung Bunga Kota Makassar ini masih sangat lemah (Reskiyanti dkk, 2018). Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah setempat dan pengelola wisata agar dapat diatasi secara perlahan dan memberi keamanan bagi pengunjung wisata pesisir yang melakukan aktivitas wisata.



Gambar 1. Lokasi wisata pesisir di Kelurahan Tanjung Merdeka Makassar



Gambar 2. Aktivitas Wisata Pesisir di Kelurahan Tanjung Merdeka Makassar:
(a) Pantai Biru; (b) Pantai Anging Mammiri; dan (c) Pantai Tanjung Bayang

Dengan adanya kawasan wisata pesisir ini pengelola wisata dan masyarakat Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate mengalami beberapa dampak kegiatan pariwisata, yakni dampak ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Pencanaan konsep *blue economy* oleh Pemerintah perlu disosialisasikan guna mengurangi dampak negatif pariwisata yang terjadi, dengan menjadikan masyarakat pesisir sebagai pusat pertumbuhan *blue economy*. Sosialisasi konsep *blue economy* ini dilakukan untuk peningkatan kapasitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan wisata sebagai sumber daya pesisir dan laut secara terpadu dengan memahami prinsip pengelolaan wisata secara berkelanjutan, berpartisipasi dalam menghadapi tantangan penurunan kualitas lingkungan hidup, pencemaran laut dan perubahan iklim, serta melawan kasus pelanggaran kelautan dan perikanan.

Berdasarkan latar belakang inilah perlu dilakukan sosialisasi konsep *blue economy* dalam pembangunan kawasan wisata pesisir Kota Makassar terhadap kelompok LPM Tanjung Merdeka, agar pengelola wisata dapat menerapkan konsep *blue economy* secara berkelanjutan. Manfaat yang akan diperoleh yakni pengetahuan dalam pengelolaan kawasan wisata pesisir secara berkelanjutan sehingga akan meningkatkan kualitas pengelola wisata sesuai konsep *blue*

economy, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang hidup berdampingan dengan sumber daya pesisir dan laut.

2. Latar Belakang Teori

Indonesia mendefinisikan *blue economy* sebagai aktivitas ekonomi berbasis laut yang dicirikan oleh modal sosial yang dioptimalkan, meminimalkan limbah, dan pembangunan yang inovatif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem (*blue economy is ocean-based economy characterized by optimized social capital, minimized waste and innovative development towards achieving people's welfare, economic growth and ecosystem sustainability*) (Rani dan Cahyasari, 2015). *Blue economy* adalah pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian dan lapangan kerja, serta kesehatan ekosistem laut. *Blue economy* mencakup banyak sektor, yakni: 1/. Pelabuhan dan pelayaran; 2/. Rehabilitasi sungai yang mengalir ke laut; 3/. Pengelolaan limbah padat dan ekonomi sirkular; 4/. Air limbah dan sanitasi; 5/. Pengelolaan dan restorasi ekosistem; 6/. Wisata pesisir dan kelautan; 7/. Energi terbarukan laut; 8/. Aquaculture; dan 9/. Perikanan. Pada sektor wisata pesisir dan kelautan, kontribusi *blue economy* terhadap masyarakat lokal pesisir adalah menjadikan masyarakat pesisir sebagai pusat pertumbuhan *blue economy*. *Blue economy* dapat mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang hidup berdampingan dengan sumber daya pesisir dan laut.

Peningkatan ekonomi dan pembangunan wilayah pesisir didasarkan pada keselarasan terhadap karakteristik lingkungan, yang dikenal dengan konsep *blue economy* (Pauli, 2010). Konsep ini didasari atas kondisi ekonomi dunia yang mempunyai kecenderungan eksploitasi melebihi daya dukung alam, sehingga diperlukan perubahan tindakan untuk mengembalikan kembali kemampuan daya dukung alam tersebut. Proses pengembangan ekonomi dimana bahan baku dan proses produksi bersumber dari alam dengan mengikuti cara alam bekerja serta memberdayakan sumberdaya dan masyarakat lokal. Proses ini diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan tetap menjaga kondisi langit serta laut tetap biru atau juga disebut dengan “*Blue Sky–Blue Ocean*” (Pauli, 2013).

Proses pembangunan kawasan pesisir menganut empat prinsip dalam *blue economy* agar lebih efisiensi dalam mengelola sumber daya alam (Pauli, 2013). Pertama, *minimize waste* bahwa proses produksi harus menghasilkan produk yang bersih (*clean production*) tanpa disertai nir limbah (*zero waste*), bahkan sedapat mungkin limbah dapat dikelola guna menciptakan inovasi bisnis turunan lain. Kedua, inklusi sosial bahwa proses produksi memberikan pemerataan kesejahteraan sosial berupa peningkatan ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat kurang mampu. Dalam konteks masyarakat, inklusi sosial merupakan hak asasi setiap warga negara, bahwa akses dan partisipasi pada berbagai aktivitas dalam kehidupan masyarakat merupakan hak asasi setiap orang (Ruman, 2014). Ketiga, kegiatan ekonomi diharapkan memiliki *multiplier effect* yakni dampak secara luas dalam beragam bentuk usaha dan tidak rentan terhadap perubahan harga pasar. Keempat, semua kegiatan memiliki inovasi dan adaptasi terhadap lingkungan (Mira dkk., 2014).

3. Metode Penanganan Masalah

3.1 Target Capaian

LPM Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate Kota Makassar sebagai salah satu pengelola wisata berbasis masyarakat dan dalam kegiatan ini berperan sebagai mitra, sangat membutuhkan informasi tentang konsep pembangunan kawasan pesisir dan pengembangan kapasitas sumber daya masyarakatnya seiring dengan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Sosialisasi konsep *blue economy* dalam pembangunan kawasan wisata pesisir Kota Makassar dilakukan guna peningkatan kapasitas pengelola wisata dan masyarakat pesisir yang bermukim di kawasan wisata. Sosialisasi ini akan membina pengelola wisata dan masyarakat pesisir lokal tentang bagaimana cara partisipasi untuk menghadapi tantangan penurunan kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim, dan pencemaran laut, yang pada akhirnya dapat memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dengan tetap memastikan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

3.2 Implementasi Kegiatan

Berlokasi di villa sekretariat LPM Tanjung Merdeka kawasan wisata pesisir Tanjung Bayang dan bertepatan hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sosialisasi konsep *blue economy* dalam pembangunan kawasan wisata pesisir Kota Makassar telah dilaksanakan, sesuai Gambar 3. Peserta yang menghadiri sosialisasi ini sebanyak 15 orang dan sebagian besar merupakan pengelola wisata dan perwakilan pemerintah, tokoh Masyarakat, dan organisasi kepemudaan Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate. Pengelola wisata berbasis masyarakat yang hadir adalah pengelola Pantai Biru, Pantai Anging Mammiri, Pantai Tanjung Bayang, dan Pantai Tanjung Layar Putih, yang keseluruhannya berada di bawah naungan LPM Tanjung Merdeka.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi Konsep *Blue Economy* dalam Pembangunan Kawasan Wisata Pesisir Kota Makassar

Tim pengabdian menegaskan bahwa wisata pesisir Kota Makassar merupakan salah satu sektor *blue economy*. Pengelola wisata pesisir sebagai bagian masyarakat pesisir harus menjadi pusat pertumbuhan *blue economy*, dalam artian dapat mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang hidup berdampingan dengan sumber daya pesisir dan laut. Peningkatan kapasitas mitra selaku masyarakat pesisir dalam kegiatan sosialisasi ini ditekankan pada pemahaman konsep keberlanjutan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, dan cara berpartisipasi dalam menghadapi tantangan penurunan kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim.

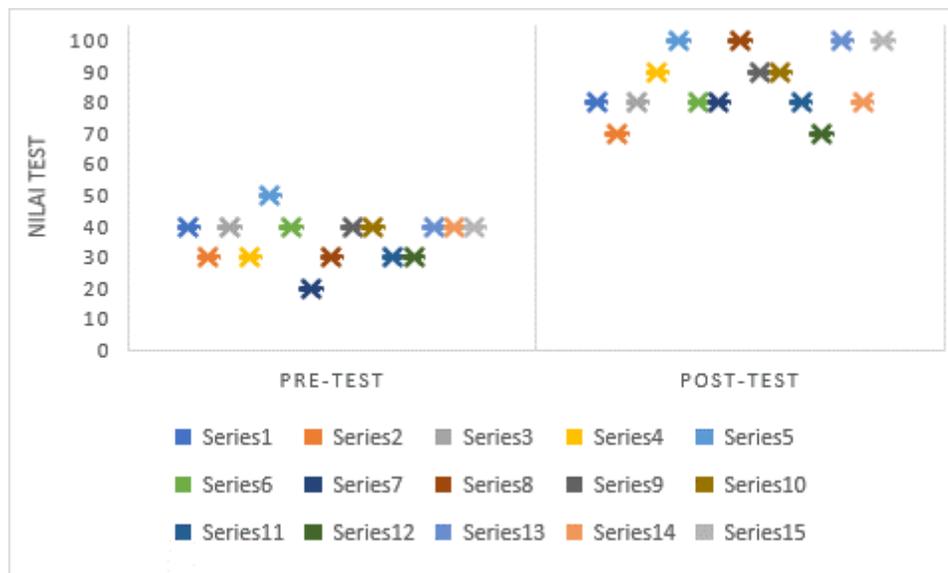
3.3 Metode Pengukuran Capaian Kegiatan

Pengukuran capaian kegiatan sosialisasi dilakukan dengan aktifitas *pre-test* dan *post-test* pada awal dan akhir sosialisasi, dimana kedua soal tes (*pre-test* dan *post-test*) adalah sama. Tes dilaksanakan dengan tes tertulis dalam bentuk soal yang pilihan jawabannya tersedia, yakni soal dua pilihan jawaban (Benar-Salah). Tes tulis ini terdiri dari sepuluh soal, dan setiap satu jawaban benar memiliki nilai sepuluh. Nilai ujian tulis memiliki rentang nilai nol sampai dengan 100 (seratus).

Materi tes adalah materi sosialisasi yang terdiri atas pengetahuan tentang: dasar kebijakan nasional *blue economy*, konsep keberlanjutan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, sektor *blue economy*, kontribusi ekonomi biru terhadap masyarakat lokal, dan peran pengelola wisata sesuai konsep *blue economy* dalam berpartisipasi menghadapi tantangan penurunan kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim.

4. Hasil dan Diskusi

Kegiatan pengabdian Departemen Teknik Kelautan sebagai bagian entitas Tri Dharma Perguruan Tinggi ini bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan dan perilaku penerapan Ipteks di masyarakat tentang pengertian konsep *blue economy* dalam pembangunan kawasan wisata pesisir Kota Makassar. Untuk menggali pemahaman dasar tentang hubungan konsep *blue economy* dan pembangunan kawasan wisata pesisir, sosialisasi didahului dengan *pre-test* dengan nilai rata-rata peserta adalah 36. Materi sosialisasi dipaparkan dengan konsep berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta diteruskan dengan sesi tanya jawab. Evaluasi pemahaman akhir peserta terhadap serapan materi sosialisasi dilakukan dengan *post-test* dengan nilai rata-rata peserta adalah 86. Sebaran nilai tes peserta sosialisasi sebanyak 15 orang ditunjukkan pada Gambar 4. Nilai antara *pre* dan *post-test* menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta sosialisasi, yakni peningkatan nilai rata-rata peserta adalah 50.



Gambar 4. Nilai Sebaran Skor Test Peserta Sosialisasi Sebanyak 15 Orang

Hasil evaluasi pengetahuan peserta sosialisasi meningkat terhadap pemahaman konsep *blue economy* dalam aktifitas pengelola wisata pesisir, seperti ditunjukkan pada Tabel 1. Evaluasi awal (*pre-test*) menunjukkan bahwa dasar kebijakan nasional, makna keberlanjutan, sektor, kontribusi terhadap masyarakat, dan peran pengelola wisata dalam kaitannya dengan *blue economy* ini belum tersosialisasi dengan baik oleh pemerintah. Sedangkan evaluasi akhir (*post-test*) menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta sosialisasi, meskipun hanya sebagian peserta dapat mencapai nilai seratus. Atas dasar evaluasi akhir ini, tim pengabdian memberikan penjelasan ulang terhadap materi sosialisasi yang belum dipahami dengan baik. Hal ini wajar disebabkan keberagaman tingkat dan latar belakang pendidikan peserta sosialisasi.

Konsep dengan orientasi *blue economy* telah diterapkan oleh mitra sebagai salah satu pengelola wisata pesisir berbasis Masyarakat di Kota Makassar. Hal ini ditunjukkan dengan penilaian penerapan konsep *blue economy* sesuai teori Pauli (2010) dan diaplikasikan oleh Mira (2014). Pertama, kebersihan lingkungan yakni dalam proses aktivitas wisata harus tetap mengedepankan kebersihan lingkungan kawasan wisata pesisir dan kelautan dan bebas sampah (*zero waste*). Kedua, inklusi sosial dalam proses pengelolaan kawasan wisata memberikan pemerataan kesejahteraan sosial berupa peningkatan ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin. Ketiga, aktifitas wisata dapat memberi nilai ekonomi dan diharapkan memiliki *multiplier effect* berupa dampak secara luas dalam berbagai bentuk usaha. Keempat, terdapat inovasi dan bersifat adaptif (Pauli, 2013). Penerapan konsep *blue economy* pada aktifitas pengelola wisata pesisir dan laut Kota Makassar oleh mitra dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 1. Peningkatan Pengetahuan Peserta Sosialisasi tentang Konsep *Blue Economy* pada Aktifitas Pengelola Wisata Pesisir Kota Makassar

No	Materi Sosialisasi	<i>Pre-Test</i>		<i>Post-Test</i>	
		Benar (%)	Salah (%)	Benar (%)	Salah (%)
1	Dasar kebijakan nasional <i>blue economy</i>	20	80	80	20
2	Konsep keberlanjutan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut	27	73	80	20
3	Sektor <i>blue economy</i>	33	67	73	27
4	Kontribusi ekonomi biru terhadap masyarakat lokal	27	73	80	20
5	Peran pengelola wisata sesuai konsep <i>blue economy</i> dalam berpartisipasi menghadapi tantangan penurunan kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim	33	67	80	20

Tabel 2. Penerapan Konsep *Blue Economy* pada Aktifitas Pengelola Wisata Pesisir Kota Makassar

No.	Konsep <i>blue economy</i>	Terapan konsep
1	Kebersihan lingkungan (<i>zero waste</i>)	Penyediaan tempat sampah dan aktifitas bersih sampah setiap hari Jum'at oleh pengelola wisata dan masyarakat pesisir.
2	Inklusi sosial	Keterlibatan tenaga kerja sebagai pengelola wisata memperoleh pendapatan setiap bulan dan dikelola berbasis masyarakat.

3	<i>Multiplier effect</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota keluarga masyarakat pesisir menjual makanan dan minuman ringan; • Masyarakat pesisir menyediakan villa dan gazebo untuk fasilitas wisata pesisir; • Menyediakan sarana aktivitas wisata seperti sewa ban, <i>floating boat</i>, dan <i>banana boat</i>.
4	Inovasi dan adaptif	<ul style="list-style-type: none"> • Produk adaptif ditemukan pada penempatan gazebo untuk fasilitas wisata pesisir diletakkan sesuai kondisi musim; • Produk inovasi sebagai ikon lokasi wisata belum ditemukan.

5. Kesimpulan

Sebagai salah satu sektor *blue economy*, wisata pesisir Kota Makassar yang dikelola berbasis masyarakat harus menjadi bagian kawasan sebagai pusat pertumbuhan *blue economy*, sehingga terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir. Sosialisasi konsep *blue economy* dalam pembangunan kawasan wisata pesisir Kota Makassar telah dilangsungkan dan dicapai peningkatan pengetahuan peserta, dimana nilai rata-rata peserta sebelum dan sesudah sosialisasi secara berturut-turut yakni 36 dan 86. Pemahaman konsep keberlanjutan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, serta cara berpartisipasi dalam menghadapi tantangan penurunan kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim akan melengkapi peran LPM Tanjung Merdeka dalam mewujudkannya. Penerapan konsep *blue economy* sesuai teori Pauli (2010) terhadap kawasan pesisir Kota Makassar telah dilakukan. Penilaian penerapan konsep *blue economy* ini didasarkan pada empat aspek, yakni kebersihan lingkungan (*zero waste*), inklusi sosial, *multiplier effect*, serta inovasi dan adaptif.

Ucapan Terima Kasih

Pengabdian kepada masyarakat Departemen Teknik Kelautan diselenggarakan atas hibah Program *Labo Based Educatioan* (LBE) Pengabdian Kolaborasi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2023. Penghargaan dan terima kasih disampaikan oleh tim pengabdian kepada Dekan Fakultas Teknik Unhas dan jajarannya, serta mitra pengabdian yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate Makassar yakni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tanjung Merdeka.

Daftar Pustaka

- Kementerian PPN/Bappenas, (2022). Kebijakan Nasional Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan dalam Dokumen Perencanaan, Deputy Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian PPN/Bappenas, 2 Desember 2022, Balikpapan.
- Mira, Firdaus, M., Reswati, E., (2014). Penerapan Prinsip *Blue Economy* pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. *Buletin Riset Sosek Kelautan dan Perikanan*, 9(1): 17-23. Terdapat pada laman <https://doi.org/10.15578/marina.v9i1.213>.
- Nasution, M., (2022). Potensi dan Tantangan Blue Economy dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Kajian Literatur. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2): 341-363. Terdapat pada laman <https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.136>.
- Pauli, G., (2010). *The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovation, 100 Milion Jobs. Paradigma Publication, Taos, New Mexico.*

- Rani, F., dan Cahyasari, W., (2015). Motivasi Indonesia dalam Menerapkan Model Kebijakan *Blue Economy* Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Transnasional*, 7(1): 1914-1928. Terdapat pada laman <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/3189>.
- Rachman, T., Juswan, Muis Alie, M. Z., Ashury, Husain, F., dan Habibie, (2023a). Mitigasi Risiko Berbasis Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kawasan Wisata Pantai Anging Mamiri Kota Makassar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 29(2): 182-190. Terdapat pada laman <https://doi.org/10.24114/jpkm.v29i2.42641>.
- Rachman, T., Juswan, Muis Alie, M. Z., Ashury, Husain, F., dan Habibie, (2023b). Sosialisasi Batas Area Renang yang Aman berdasarkan Kondisi Batimetri Kawasan Wisata Pantai Tanjung Bayang Makassar. *JURNAL TEPAT: Teknologi Terapan untuk Pengabdian Masyarakat*, 6(1): 76-85. Terdapat pada laman https://doi.org/10.25042/jurnal_tepat.v6i1.358.
- Rachman, T., Juswan, Paroka, D., Baeda, A.Y., Rahman, S., Paotonan, C., Umar, H., Muis Alie, M. Z., Ashury, Husain, F., dan Assidiq, F. M., (2023c). Sosialisasi *Geohazard* Pesisir dan Lautan Kawasan Wisata Pesisir Kota Makassar. *JURNAL TEPAT: Teknologi Terapan untuk Pengabdian Masyarakat*, 6(2): 470-478. Terdapat pada laman https://doi.org/10.25042/jurnal_tepat.v6i2.451.
- Rachman, T., Juswan, Paroka, D., Baeda, A. Y., Rahman, S., Paotonan, C., Hasdinar, Muis Alie, M. Z., Ashury, dan Husain, F., (2018). Pengenalan Perangkat Keselamatan Sarana Pelabuhan Moda *Waterway* Sungai Tallo Makassar. *JURNAL TEPAT: Teknologi Terapan untuk Pengabdian Masyarakat*, 1(1): 71-86. Terdapat pada laman https://doi.org/10.25042/jurnal_tepat.v1i1.21.
- Rachman, T., Juswan, Muis Alie, M. Z., Paotonan, C., Umar, H., dan Baeda, A. Y., (2019). Diseminasi Perangkat Keselamatan Pelayaran Moda *Waterway* Sungai Tallo Makassar bagi Masyarakat Pulau Lakkang. *JURNAL TEPAT: Teknologi Terapan untuk Pengabdian Masyarakat*, 2(1): 52-62. Terdapat pada laman https://doi.org/10.25042/jurnal_tepat.v2i1.60
- Rachman, T., Umar, H., dan Bahtiar, I. H., (2022). Dampak Perubahan Garis Pantai terhadap Pemanfaatan Lahan Pesisir Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. *Zona Laut: Inovasi Sains dan Teknologi Kelautan*, 3(1): 7-14. Terdapat pada laman <https://doi.org/10.20956/zt.v3i1.20533>.
- Rachman, T. dan Arifki, M. A., (2022). Indeks Kerentanan Wilayah Pesisir Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. *Jurnal Penelitian Enjiniring*, 26 (1), 9-17. Terdapat pada laman <https://cot.unhas.ac.id/journals/index.php/jpe/article/view/1446>.
- Reskiyanti, Rachman, T., dan Paotonan, C., (2018). Tinjauan Batasan Sempadan Pantai Tanjung Bunga sebagai Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2014. *Prosiding Seminar Sains dan Teknologi Kelautan (SENSISTEK)*, ke 1. Gowa.
- Ruman, Y. S., (2014). Inklusi Sosial dalam Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di DKI Jakarta. *Humaniora*: 5 (1), 113-121. Terdapat pada laman <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2989>.
- Suleman, Y., Rachman, T., dan Paotonan, C., (2018). Tinjauan Degradasi Lingkungan Pesisir dan Laut Kota Makassar Terhadap Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pesisir. *Prosiding Seminar Sains dan Teknologi Kelautan (SENSISTEK)*, ke 1. Gowa.

- Umar, H., Rachman, T., dan Sari, I. P., (2019). Analisis Perubahan Lahan Akibat Perubahan Garis Pantai di Wilayah Pesisir Kecamatan Biringkanaya. *Prosiding Seminar Sains dan Teknologi Kelautan (SENSISTEK)*, ke 2. Gowa.
- World Bank, & UN DESA, (2017). *The Potential of the Blue Economy: Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries*, World Bank, Washington, DC. Terdapat pada laman <https://doi.org/10.1596/26843>.